

DAFTAR PUSTAKA

A. Daftar Buku

- Abdulkadir, Muhammad. 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Bakri, Muhammad, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara, Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria*. Yogyakarta.
- Fair, Marvin L, 1954, *Port Adminstration In the United States*, Cornell Maritime Press, Cambridge.
- Fauzi ,Noer, 1999, *Petani & Penguasa, Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*, Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Fajar, Mukti dan Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Harsono, Boedi, 1997, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pemebentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Cetakan Ketujuh, Edisi Revisi*, Djambatan, Bandung.
- HR, Ridwan, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet 2, Kencana, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.
- Richards, Paul H, 1999, *Law of Contract*, 4th ed., Financial Time Pitan Publishing.
- Subekti, 1980, *Pokok-pokok hukum perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. III, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Utrecht, 1990, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Cet ke-9 disadur dan direvisi oleh Moh. Djindang*. Balai Buku ichtiar, Jakarta.

B. Daftar Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5502)

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070).

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2015 tentang Konsesi dan Bentuk Kerjasama Lainnya Antara Pemerintah Dengan Badan Usaha Pelabuhan Dibidang Kepelabuhanan.

C. Internet

Big.go.id, BIG Serahkan Peta NKRI Kepada Kemenkokesra, <http://www.big.go.id/berita-surta/show/big-serahkan-peta-nkri-kepada-kemenkokesra> diakses pada tanggal 15 Juli 2019.